

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amrani, Hanafi, 2019, *Politik Pembaruan Hukum Pidana*, UII Press, Yogyakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 1996, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Tindak Pidana dengan Pidana Penjara*, BP UNDIP, Semarang.
- _____, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta.
- Eddyono, Supriyadi W., dkk., 2015 *Hukuman Mati dalam RKUHP: Jalan Tengah Yang Meragukan*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta.
- Kanter, E.Y., dan SR Sianturi, 2012, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.
- Komnas HAM, dkk., 2020, “*Kertas Kebijakan Fenomena Deret Tunggu dan Rekomendasi Komutasi Hukuman Mati*”, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Kerjasama Untuk Pencegahan Penyiksaan, Jakarta.
- Komnas Perempuan, 2024, “*Jiwa-Jiwa Yang Disiksa: Laporan Pemantauan Situasi Perempuan Terpidana Mati di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP)*”, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta.
- Lamintang, PAF., 1996, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Manan, Bagir, 2004, *Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik)*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Najih, Mokhamad, 2014, *Politik Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Salam, Moch. Faisal, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Sianturi, SR., 1985, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.
- Sjarif, Amiroeddin, 1996, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, BP UNDIP, Semarang.
- _____, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Menyesuaikan Hukum Pidana Tentara (staatsblad 1934, No.167) Dengan Keadaan Sekarang.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169).
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439).
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104).

Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer (Lembaran Negara Nomor 38 Tahun 1964).

C. Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Evelin Mariai, Joice, 2016, “Mekanisme yang Menghambat dan Implikasinya dalam Pelaksanaan Pidana Mati”, *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Hidayat, Rezqy, 2020, “Kebijakan Formulasi Mengenai Pidana Mati Bersyarat Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Hidayat, Taufik Rizki, 2022, “Pemetaan Eksekusi Pidana Mati pada Praktik di Tingkat Global untuk Formulasi Eksekusi Pidana Mati di Masa yang Akan Datang”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Putri, Salwa Salsabila Wahyu, 2024, “Penjatuhan Pidana Mati terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

D. Artikel Jurnal

Firdaus, Afifah dan Indra Yugha Koswara, “Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia: Analisis Tentang Pidana Pengawasan dan Asas Keseimbangan”, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 9 No.1, Juni, 2024.

Laia, Sri Wahyuni dan Sodialman Daliwu, “Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis dalam Pembentukan Undang-Undang yang bersifat Demokratis di Indonesia”, *Jurnal Education and Development* Vol. 10, No. 1, 2022.

Padang, Michael Adhyaksa, Billi J. Siregar, dan Rosmalinda, “Keberpihakan Pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023”, *Jurnal Konsep Ilmu Hukum* Vol. 4, No. 2, September, 2024.

PH, Agustinus dan Yuliana Yuli W, “Pembaharuan Hukum Pidana Militer dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 1 No.2, 2014.

Prasetya, Budi Herlambang dan Achmad Shafiyul Fuad, “Akuntabilitas dan Transparansi Publik Sebagai Instrumen Mencegah dan Memberantas Tindak

Pidana Korupsi”, Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol. 2, No. 3, Surakarta, 2013.

Putri, Dita Melati, “*Hukuman Pidana Mati dalam KUHP Baru dan Perspektif Abolisionalis serta Retensionis*”, Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, Vol. 2, No. 4, Agustus, 2024.

Supriyadi, “*Penerapan Pidana Pemecatan terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia sebagai Pelaku Tindak Pidana*”, Mimbar Hukum, Vol. 20 No. 2, Juni, 2008.

Widyaningrum, Hesti, “*Ancaman Pidana Mati yang Bersifat Khusus dan Alternatif dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*”, Jurnal Kajian Ilmiah UBJ, Vol. 16 No.1, 2016.

E. Artikel dalam Internet

Andi Saputra, “*Begitu Situasi Pomdam Saat Terpidana Mati Prada Mart Kabur dari Penjara*” , <https://news.detik.com/berita/d-2945105/begitu-situasi-pomdam-saat-terpidana-mati-prada-mart-kabur-dari-penjara>, Diakses 12 November 2025.

Bintang Bangsa, “*“Tiga Pedoman TNI: Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib TNI*”, <https://bintangbangsa.com/2025/07/10/tiga-pedoman-tni-sapta-marga-sumpah-prajurit-dan-8-wajib-tni/>, diakses 26 Oktober 2025.

Dandapala Mahkamah Agung RI, “*Prof Harkristuti: Pidana Mati dalam KUHP Baru adalah Ciri Khas Indonesia*”, <https://dandapala.com/article/detail/prof-harkristuti-pidana-mati-dalam-kuhp-baru-adalah-ciri-khas-indonesia> , diakses 10 November 2025.

Gita Irawan, “*TNI AD Ungkap Nasib Kopda Bazarsah Setelah Dijatuhi Vonis Mati dan Dipecat dari Militer*”, <https://www.tribunnews.com/nasional/2025/08/11/tni-ad-ungkap-nasib-kopda-bazarsah-setelah-dijatuhi-vonis-mati-dan-dipecat-dari-militer>, Diakses 12 November 2025

Immanuel Citra Senjaya, “*KUHP lama belum terintegrasi nilai-nilai Pancasila*” <https://jateng.antaranews.com/berita/276116/kuhp-lama-belum-terintegrasi-nilai-nilai-pancasila>, Diakses 10 November 2025.

Kemdikbud, “*Induksi dan Deduksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses 9 September 2025.

Kompasiana, “*“Salus Populi Suprema Lex Esto” Keselamatan Rakyat Merupakan Hukum Tertinggi!*”, <https://www.kompasiana.com/fitsarisawalsangadji2903/661e349114709376ef755ff2/salus-populi-suprema-lex-esto-keselamatan-rakyat-merupakan-hukum-tertinggi>, diakses 8 September 2025.

Liputan 6, “Suud Rusli Dipindahkan ke Surabaya”, <https://www.liputan6.com/news/read/113722/suud-rusli-dipindahkan-ke-surabaya>, Diakses 12 November 2025.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Meluruskan Konsep Pidana Mati dalam KUHP Baru” <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/meluruskan-konsep-pidana-mati-dalam-kuhp-baru-01E>, diakses 1 Oktober 2025.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Pengadilan Militer Palembang Vonis Mati Kopda Bazarsah,” <https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/pengadilan-militer-palembang-vonis-mati-kopda-bazarsah-0tK>, diakses 18 Agustus 2025.

Nafiatul Munawaroh, “Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis-1t59394de7562ff/>, diakses 10 November 2025.

Pinter Hukum, “Negara Kekuasaan (Machtstaat)”, <https://pinterhukum.or.id/negara-kekuasaan-machtstaat/>, diakses 8 September 2025.

Pusat Penerangan TNI, “Panglima TNI: Lapas Militer Jauh Lebih Angker & Intoleran dari Lapas Umum”, <https://tni.mil.id/view-230739-panglima-tni-lapas-militer-jauh-lebih-angker-intoleran-dari-lapas-umum.html>, Diakses 12 November 2025.

Pusat Penerangan TNI, “Sejarah TNI”, <https://tni.mil.id/sejarah-tni>, diakses 8 September 2025.

Surya Malang, “Wawancara Eksklusif Suud Rusli, Eks Pasukan Elit Terpidana Mati Kasus Pembunuhan Dirut PT Asaba”, <https://suryamalang.tribunnews.com/2020/09/30/wawancara-eksklusif-suud-rusli-eks-pasukan-elit-terpidana-mati-kasus-pembunuhan-dirut-pt-asaba>, Diakses 12 November 2025

Wartakota, “Suud Rusli Bongkar Penyebab Melarikan Diri dari Rumah Tahanan Militer, Kini Tak Berniat Kabur Lagi”, <https://wartakota.tribunnews.com/2020/09/30/suud-rusli-bongkar-penyebab-melarikan-diri-dari-rumah-tahanan-militer-kini-tak-berniat-kabur-lagi>, Diakses 12 November 2025.

F. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 248 K/MIL/2013 perihal Kasasi yang diajukan oleh Prada Mart Azzanul Ikhwan.

Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 14-K/PM II-08/AL/II/2005 perihal perkara Kopda Mar Suud Rusli dan Letda Mar Syam Ahmad Sanusi, 8 Februari 2005.



Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 63-K/PM.II-09/AD/III/2013 perihal perkara Prada Mart Azzanul Ikhwan, 24 April 2013.

Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 50-K/PM.I-04/AD/V/2025 perihal perkara Kopda Bazarsah, 11 Agustus 2025.